



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERAN PROYEK INTERNASIONAL DALAM PENCIPTAAN PELUANG BARU BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA

Disampaikan oleh :

MENTERI PEKERJAAN UMUM

Pada acara

Seminar Proyek Internasional

SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN – ITB

Jakarta, 24 November 2005

*Yang Terhormat para Guru Besar, para Pengajar, dan segenap
Civitas Academica Sekolah Bisnis dan Manajemen - ITB, dan para
peserta seminar yang kami hormati,*

*Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua.*

Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, saya menyambut baik permintaan untuk menyampaikan paparan dalam acara Seminar yang diselenggarakan oleh Sekolah Bisnis dan Manajemen – ITB. Seminar dengan mengambil tema **“Peran Proyek Internasional dalam Penciptaan Peluang Baru Bagi Pembangunan Indonesia”** ini, menurut hemat kami akan sangat mendukung upaya Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dewasa ini baik melalui pendanaan dalam negeri maupun pinjaman atau investasi dari luar negeri. Sebagai awal paparan, saya ingin menyampaikan mengenai **Peranan Infrastruktur dalam Mendukung Pembangunan Nasional**. Infrastruktur Pekerjaan Umum, mempunyai peran yang vital dalam mendukung ekonomi, sosial – budaya, kesatuan dan persatuan terutama sebagai katalisator di antara proses produksi, pasar dan konsumen akhir;

merupakan modal sosial masyarakat; memfasilitasi lebih terbukanya cakrawala masyarakat dan mempertemukan budaya antar masyarakat; mengikat dan menghubungkan antar daerah; dan melalui penyediaan infrastruktur untuk mendukung Ketahanan Pangan memberikan rasa aman tercukupi kebutuhan dasar masyarakat.

Pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum sejauh ini pada hakikatnya telah memberi landasan yang mendukung kehidupan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Hal ini tercermin dari pengembangan sumber daya air (SDA) terutama jaringan irigasi di Indonesia selama 3 dasawarsa terakhir telah menjadi pendukung program ketahanan pangan. Jaringan irigasi telah terbangun sebanyak 6,8 juta ha dan jaringan irigasi rawa terbangun 1,8 juta ha. Disamping itu pembangunan puluhan waduk serbaguna berikut prasarana penunjangnya telah menjadi sumber air bagi penyediaan air minum dan air untuk berbagai keperluan lainnya seperti pembangkit listrik tenaga air dan pengendalian banjir yang kesemuanya mendukung pengembangan perkotaan, industri dan sektor jasa.

Sistem air bersih terbangun mampu melayani 45 juta atau 40% penduduk perkotaan dan 7 juta atau 8% penduduk perdesaan. Pembangunan prasarana lingkungan permukiman kumuh telah mencapai 21.000 ha yang tersebar di kota besar dan sedang. Kesemuanya telah memberi manfaat meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah, meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal, serta terbukanya kesempatan kerja.

Dibidang jalan, telah terbangun Aset Jalan Nasional 34.600 km, Propinsi 46.500 km, Kabupaten 241.000 km, dan Kota 25.500 km serta Jalan Tol termasuk aksesnya 600 km yang telah menghubungkan berbagai pusat permukiman dan pasar, sehingga memberi manfaat terutama meningkatnya mobilitas distribusi berbagai produk barang dan jasa dalam ekonomi nasional.

Namun perlu disadari bahwa pada saat ini masih dijumpai berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur Pekerjaan Umum. Terdapat kesenjangan aset infrastruktur antar wilayah yang membawa implikasi pada terjadinya disparitas ekonomi dan mengganggu stabilitas sosial budaya masyarakat. Dihadapi pula tantangan belum optimalnya jaringan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan, jaringan jalan masih banyak yang kondisinya tidak mantap, keterbatasan akses dari pusat-pusat produksi ke pemasaran, masih banyaknya kawasan kumuh maupun kinerja sebagian besar PDAM yang belum mantap.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, visi, misi dan strategi telah dituangkan dalam dokumen "Renstra Departemen PU 2005 –2009". **Visi** Departemen PU "**Menyediakan infrastruktur PU yang handal, bermanfaat dan bersinergi dengan sektor lain dalam mendukung pengembangan wilayah dan permukiman, agar terwujudnya Indonesia yang aman dan damai, adil & demokratis serta lebih sejahtera**". Adapun **misi** yang diemban pada pokoknya adalah menata ruang nusantara yang nyaman dan berkualitas, memenuhi kebutuhan infrastruktur PU wilayah berupa infrastruktur sumber daya air dan mengembangkan infrastruktur PU di permukiman, melaksanakan pembinaan bangunan gedung, mendorong berkembangnya industri konstruksi, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur PU, meningkatkan keandalan mutu infrastruktur PU, mengembangkan organisasi efisien, dan SDM profesional.

Dalam mewujudkan visi dan misi, maka **strategi** dalam membangun infrastruktur PU dilakukan melalui pendekatan wilayah dengan basis Tata Ruang agar dicapai keserasian penanganan **secara spatial antara infrastruktur PU** skala Nasional, Regional, Perkotaan, dan Perdesaan; **secara sektoral** terutama antara Jalan, Air dan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman; serta **antar pemangku kepentingan**, baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

Memperhatikan kondisi Indonesia, pendekatan pembangunan wilayah dilakukan dengan mengelompokkan wilayah Indonesia berdasarkan tingkat perkembangannya. Pendekatan tersebut membagi wilayah nasional kedalam tiga kategori, yaitu pengembangan infrastruktur di

kawasan telah berkembang (P. Jawa, Bali, dan Sumatera), kawasan mulai berkembang (P. Kalimantan, Sulawesi, dan NTB), dan kawasan pengembangan baru (Kep. Maluku, Papua, dan NTT).

Peserta seminar yang saya hormati,

Sangat disadari bahwa dalam pembangunan infrastruktur diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan perkembangan jaman, teknologi telah berkembang begitu pesat, dan telah semakin menyatukan dunia dalam tatanan sosial ekonomi dan politik. Perkembangan lingkungan strategis menunjukkan bahwa dalam era informasi ini terjadi pergeseran industri dari padat modal menjadi padat pengetahuan, dan daya saing nasional menjadi indikator penting kemajuan .

Perguruan Tinggi yang berperan penting dalam menghasilkan SDM yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan melakukan pula berbagai penelitian, dan pengembangan sehingga membekali mahasiswanya yang dalam berkarya nantinya dapat terus mengembangkan teknologi antara lain rancang bangun dan manajemen konstruksi. Sinergi perguruan tinggi dengan pemerintah dan industri secara luas dalam bidang antara lain rancang bangun infrastruktur akan mendukung terwujudnya SDM profesional, kemajuan IPTEK dan juga kemajuan industri konstruksinya sendiri.

Di era globalisasi sekarang ini terdapat berbagai tantangan yang dihadapi Perguruan Tinggi yang sangat mempengaruhi kesiapan lulusannya nanti dalam berkiprah didalam realita pembangunan infrastruktur. **Tantangan** yang besar diperankan Perguruan Tinggi dalam mememanajementi agar dapat berfungsinya dengan baik aset infrastruktur tersebut dan mendukung perluasan pembangunan infrastruktur dengan berbagai inovasi Teknologi Rancang Bangun. Para pendahulu kita, seperti Ir. Sutami telah meletakkan pendekatan wilayah dalam pengembangan infrastruktur agar terpadu lintas sektor dan lintas wilayah yang saat ini kita gunakan dan kembangkan lebih lanjut. Berbagai prestasi yang lain terutama rancang bangun Jembatan Semanggi, pondasi cakar ayam yang telah diterapkan pada jalan tol dan Bandara Sukarno Hatta. Jembatan Barito dengan teknologi "twin suspension", Bareleng dengan "Cable Stayed" maupun "Arc Bridge".

Dalam pembangunan jalan dan jembatan tol di daerah lalu lintas padat perkotaan, telah dikembangkan teknologi pilar jembatan berputar Sosrobahu. Ke depan insan perguruan tinggi perlu mengantisipasi rencana pembangunan Jalan Tol Trans Jawa misalnya dengan substitusi teknologi berbasis dalam negeri seperti substitusi pemanfaatan aspal impor dengan semen produk dalam negeri dengan mengembangkan teknologi konstruksi perkerasan kaku, stabilisasi tanah dengan semen maupun pengembangan jenis semen khusus untuk jalan dan jembatan, sebagaimana sedang dilakukan pada Jembatan Suramadu. Pengembangan Jembatan Panjang gantung suspensi maupun gantung cable stayed seperti yang sedang dibangun di jembatan Suramadu dengan bentang panjang di tengah lautan perlu terus dikembangkan lebih lanjut termasuk kombinasi gantung suspensi dengan cable stay maupun teknologi terowongan misalnya untuk diterapkan di Selat Sunda.

Dalam pengembangan Sumber Daya Air masih banyak diperlukan pembangunan bendungan dan waduk, sistim jaringan irigasi maupun normalisasi sungai dan pemeliharaan daerah aliran sungai yang memerlukan berbagai inovasi penanganan. Sejauh ini antara lain pengembangan Wilayah Sungai Brantas yang didekati dengan suatu rencana terpadu dari hulu sungai sampai hilir dan satu manajemen yang berkembang dalam bentuk korporatisasi telah melahirkan berbagai karya rancang bangun Bendungan Besar, Bendung Karet, termasuk terowongan maupun teknologi Sabo yang juga dikembangkan di Gunung Merapi, sistem irigasi maupun rancang bangun pengendali banjir. Berbagai prestasi yang lain termasuk pengembangan reklamasi rawa multiguna seperti di Rawa Sragi, Lampung maupun Sistem Pompa Hidrologi Sedyatmo Curug. Demikian pula untuk infrastruktur permukiman diperlukan pengembangan lebih lanjut teknologi instalasi pengolahan air bersih, instalasi pengolahan air limbah maupun sanitary landfill. Melekat dalam perkembangan teknologi infrastruktur tersebut adalah manajemen konstruksi yang terus berkembang pula seiring perkembangan teknologi komputer, berbagai peralatan konstruksi dan perkembangan metodologi. Berbagai perkembangan ini semakin menuntut kesiapan ahli terutama teknologi infrastruktur, manajemen infrastruktur dan sistem pendanaan infrastruktur.

Peserta Seminar sekalian,

Menyikapi tantangan dan tuntutan kehadiran tenaga ahli mendatang, sangat diharapkan Lembaga Pendidikan seperti ITB, bersama Perguruan Tinggi yang lain dapat memenuhinya. Setelah lulus dari proses pendidikan, diharapkan terus belajar menggeluti aplikasi bidang ke ilmuannya sedemikian sehingga dalam waktu tidak terlalu lama akan terbentuk tenaga ahli yang profesional sebagai pelaksana kelanjutan pembangunan Bangsa dan Negara.

Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum selama lima tahun mendatang diperlukan investasi Rp. 225 trilyun. Namun, Pemerintah diperkirakan hanya mampu membiayai Rp. 127 trilyun, dengan memperhitungkan pula adanya **bantuan internasional**. Sisa sebesar Rp. 98 trilyun diupayakan dari partisipasi pihak swasta sesuai komitmen pemerintah yang mereformasi kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam menarik minat swasta berinvestasi dibidang infrastruktur pekerjaan umum.

Dari gambaran mengenai kebutuhan pendanaan tersebut terlihat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak terlepas dari **bantuan internasional**. Namun demikian bantuan internasional tersebut hanya bersifat pelengkap karena pembangunan infrastruktur nasional tetap didasarkan pada kemampuan pendanaan dalam negeri sebagai sumber utama. Selain itu, bantuan internasional khususnya yang berupa pinjaman dimanfaatkan secara selektif hanya untuk proyek-proyek yang mempunyai nilai kelayakan yang tinggi, memerlukan teknologi tertentu yang belum dikuasai di Indonesia, mempunyai nilai tambah yang tinggi, dan bersifat multiyears. Dengan pertimbangan tersebut, maka dalam pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan terjadi sinergi berbagai potensi dengan lingkungan internasional. Selain itu, seperti yang disampaikan dalam *Infrastruktur Summit* yang diselenggarakan di awal 2005, dibuka pula peluang bagi investor baik lokal maupun asing untuk melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur, seperti halnya pembangunan jalan tol dan penyediaan air bersih. Melalui investasi internasional dalam pembangunan infrastruktur tersebut diperoleh banyak manfaat terutama dukungan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional

Segenap peserta seminar yang saya hormati,

Sebagai ilustrasi, ditunjukkan beberapa proyek infrastruktur internasional di Departemen PU. Salah satu Proyek Internasional besar yang ditangani Direktorat Jenderal Sumber Daya Air adalah **Proyek pembangunan bendungan Bili-Bili** di Propinsi Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di Kabupaten Gowa sekitar 30 km sebelah timur Kota Ujung Pandang. Proyek ini dimulai tahun 1992 dengan sumber dana dari pinjaman OECF (sekarang JBIC) untuk mengatasi masalah banjir di Ujung Pandang akibat luapan air Sungai Jeneberang di bagian hilir, serta untuk mensuplai air irigasi di Kabupaten Gowa. Setelah pembangunan, Bendungan ini telah memiliki berbagai peranan penting bagi kehidupan masyarakat sekitarnya meliputi: Pengendalian banjir Sungai Jeneberang, penyediaan air minum dan air untuk industri, penyediaan air untuk irigasi, Pembangkit Listrik Tenaga Air, perikanan darat dan daerah wisata. Dalam peranannya untuk pengendalian banjir Sungai Jeneberang, Waduk Serba Guna Bili-bili mengendalikan banjir (Q) 50 sebesar 2.200 m³/ detik menjadi 1.200 m³/ detik, sehingga dapat mengurangi banjir kiriman Sungai Jeneberang dari Kabupaten Gowa ke Kota Makasar, setara dengan berkurangnya luasan banjir Kota Makasar sebesar 5.200 ha.

Dalam hal penyediaan air baku, Waduk Bili-bili mampu menyediakan air baku sebesar 3.300 liter/ detik yang dialirkan melalui pipa air baku bawah tanah ke WTP- Sombaopu, yang baru mampu mengolah air baku sebesar 1000 liter/ detik. Air bersih yang dihasilkan kemudian didistribusikan ke pelanggan PDAM yaitu unit satuan sambungan dan industri Kota Makasar serta sekitarnya. Dalam hal penyediaan air untuk irigasi, Waduk Bili-Bili menyediakan air untuk tiga Daerah Irigasi yaitu : Bili-Bili, Kampili, Bissua sebesar 24.585 ha di musim hujan dan 19.540 ha di musim kemarau. Dalam peranannya sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air, Waduk Bili-Bili mampu menghasilkan daya lebih besar dari 16,3 MW. Pembangunan Bendungan Bili-Bili sebagai waduk buatan juga memungkinkan penebaran ikan di waduk untuk mengembangkan populasi ikan dan memberikan peluang kepada penduduk sekitar waduk untuk menjadi nelayan dan mengembangkan perikanan darat. Selain itu Bendungan Bili-Bili sendiri merupakan pula suatu obyek wisata yang potensial.

Untuk proyek Internasional besar yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bina Marga adalah **proyek pembangunan Jembatan Pasupati** di Bandung. Proyek pembangunan Jembatan Pasupati meliputi 4 Kecamatan dengan kebutuhan lahan sebesar sekitar 55.260 m² terdiri dari 5.430 m² status lahan milik negara, 21.850 m² status lahan milik Pemerintah Kota Bandung dan 27.980 m² status lahan milik masyarakat serta fasilitas umum. Proyek ini memiliki sumber pembiayaan dari pinjaman Pemerintah Kuwait untuk memperlancar arus lalu lintas di kota Bandung. Saat itu mobilitas kendaraan arah Barat - Timur dan sebaliknya di wilayah utara kota Bandung hanya dilayani Jalan Siliwangi di sisi Utara dan Jalan Wastukencana di sisi Selatan. Analisis studi lalu lintas memprediksi kedua jalan tersebut mulai tahun 2006 tidak akan memadai menampung pertumbuhan lalu lintas yang ada. Oleh karena itu kemudian muncul beberapa alternatif pemecahan yang salah satunya pembangunan Jembatan Pasupati. Jembatan Pasupati direncanakan memiliki peranan besar dalam meningkatkan kualitas lalu lintas di kota Bandung, antara lain menambah kapasitas ruas jalan dan persimpangan arah Barat - Timur kota Bandung, mengurangi kemacetan lalu lintas di beberapa simpang dan ruas jalan, melengkapi sistem jaringan jalan di kota Bandung, mendukung ekonomi regional dengan adanya pengurangan biaya operasi kendaraan dan waktu tempuh perjalanan pada jalur Barat – Timur, meningkatkan kondisi lingkungan kota dengan mengurangi tingkatan polusi akibat kemacetan yang ada serta sekaligus sebagai pembentuk struktur dalam menata kawasan Taman Sari.

Salah satu Proyek Internasional besar yang ditangani Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah **proyek pembangunan sewerage di Bali**. Proyek yang bernama Denpasar Sewerage Development Project (DSDP) ini sebagian besar dibiayai pinjaman dari Jepang dan dimulai dengan studi tahun 1991 yang dilanjutkan konstruksi tahun 2003 dan diharapkan selesai tahun 2008. Proyek ini ditujukan untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang ada dan meningkatkan kondisi lingkungan hidup kawasan wisata Bali. Proyek ini direncanakan meliputi 3 daerah yaitu Denpasar, Sanur dan Kuta; akan tetapi akibat resistensi masyarakat Kuta, sebagian dari sistem sewerage yang direncanakan di Kuta akan dialihkan ke daerah Legian dan Seminyak.

Untuk mengetahui peranan yang akan dipegang oleh Proyek DSDP ini, perlu dilihat rencana jumlah penduduk yang akan terlayani dan luas area pelayanannya nanti. Pada tahun 2010 nanti, Proyek DSDP direncanakan akan dapat melayani 73.700 jiwa di Denpasar dan 16.500 jiwa di Sanur. Luas Area Pelayanannya akan mencapai 520 hektar untuk Denpasar dan 331 hektar untuk Sanur. Kelanjutan Proyek DSDP akhirnya akan dapat melayani 310.100 jiwa di Denpasar dan 28.400 jiwa di Sanur, dengan Luas Area Pelayanan sebesar 2.690 hektar di Denpasar dan 700 hektar di Sanur.

Hadirin sekalian,

Sebagai penutup telah ditunjukkan bahwa Infrastruktur mempunyai peranan yang vital bagi pembangunan nasional, baik, dalam penciptaan lapangan kerja, menunjang pertumbuhan ekonomi dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pembangunan infrastruktur nasional tetap didasarkan pada kemampuan pembiayaan nasional sebagai sumber pendanaan utama, dan pinjaman luar negeri hanya bersifat sebagai unsur pelengkap. Pembangunan infrastruktur yang dibiayai pinjaman luar negeri pada dasarnya mempunyai nilai kelayakan ekonomi tinggi, sedangkan infrastruktur yang secara finansial dan ekonomi layak, ditawarkan untuk dibiayai investasi langsung baik dari pengusaha dalam negeri maupun luar negeri, seperti jalan tol dan air bersih. Dengan demikian melalui implementasi tersebut diharapkan dapat diwujudkan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia yang aman-damai, adil-demokratis, dan lebih sejahtera.

Sekian dan Terima Kasih,

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Jakarta, 24 November 2005

**MENTERI PEKERJAAN
UMUM**

Djoko Kirmanto

LAMPIRAN

Khusus mengenai bantuan internasional untuk pembangunan infrastruktur bidang ke-PU-an dapat digambarkan sebagai berikut :

Saat ini Direktorat Jenderal Bina Marga menangani 9 proyek dengan nilai pinjaman sebesar US\$ 1.390.104.000, yang terdiri dari 4 proyek multilateral dan 5 proyek Bilateral, sementara Ditjen. Cipta Karya menangani 13 proyek yang dengan nilai pinjaman sebesar US\$ 686.924.000, terdiri dari 9 proyek Multilateral dan 4 proyek Bilateral, dan Ditjen. Sumber Daya Air menangani 20 proyek dengan nilai pinjaman US\$ 1.634.732.000, yang terdiri dari 7 proyek Multilateral dan 13 proyek Bilateral.

Rekapitulasi untuk proyek-proyek internasional yang ditangani oleh Departemen Pekerjaan Umum beserta pinjamannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

REKAPITULASI PINJAMAN LUAR NEGERI PROYEK-PROYEK DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

STATUS : 31 JULI 2005

(US\$ 000)

NO.	NAMA DIREKTORAT JENDERAL	N P L N						TOTAL NPLN	JUMLAH PINJAMAN
		MULTILATERAL		BILATERAL					
		IBRD	ADB	JBIC	KOREA	KUWAIT	CHINA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	BINA MARGA	3	1	4	0	0	1	9	1,390,104.0
2	CIPTA KARYA	6	3	2	1	1	0	13	686,924.0
3	SUMBER DAYA AIR	1	6	13	0	0	0	20	1,634,732.0
	Total	10	10	19	1	1	1	42	3,711,760.0